

Bab V

Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan Kota Palopo

Tahun 2008-2013

A. Visi

Perumusan Visi Kota Palopo berangkat dari kesadaran akan modal dasar yang dimiliki sebagai kekuatan untuk memanfaatkan setiap peluang yang datang dari lingkungan eksternal organisasi, serta sadar akan kelemahan organisasi dan tantangan yang dihadapi ke depan, melakukan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan daerah periode yang lalu dan menganalisa permasalahan – permasalahan yang dihadapi, kesadaran itu dituangkan ke dalam gagasan ideal yang hendak diwujudkan pada momentum kedua pembangunan Kota Palopo yang dirumuskan ke dalam visi

“Menjadi Salah Satu Kota Pelayanan Jasa Terkemuka Di Kawasan Timur Indonesia
”

Visi menjadi gambaran dari ekspresi atas gagasan ideal yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, selain itu visi juga merupakan pernyataan aspirasi dan cita-cita masyarakat Kota Palopo dalam bergerak maju secara bertahap dan terencana melalui pencapaian target strategis pembangunan Kota Palopo. Subtansi visi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. ***Menjadi Salah Satu yang terkemuka***, mengandung makna motivasi yang kuat untuk melakukan sebuah proses perubahan yang berkesinambungan dan terencana dalam rangka mengangkat Kota Palopo sejajar dengan kota-kota yang lebih dahulu maju, dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Rumusan ini dapat pula diartikan sebagai suatu proses yang kompetitif melalui berbagai upaya untuk mencapai posisi relatif diantara daerah-daerah lainnya di kawasan timur Indonesia.

- b. ***Kota Pelayanan Jasa***, menunjukkan komitmen yang ingin diwujudkan, secara umum dan sederhana “Kota pelayanan jasa“ dapat dimaknai sebagai upaya menjadikan pelayanan pemerintahan daerah (birokrasi) menjadi pelayanan yang lebih profesional, pelayanan yang mengedepankan hasil daripada proses, pelayanan yang mempunyai standar pelayanan dan kepastian kualitas pelayanan. Pemaknaan lainnya dari konsep “*Kota pelayanan jasa*” dapat pula dimaknai sebagai upaya menjadikan Kota Palopo sebagai salah satu kota yang berciri “kekotaan”, dimana sektor-sektor sekunder seperti perdagangan, jasa dan industri yang berbasis pada hasil pertanian dapat lebih berkembang.

B. Misi

Untuk merealisasikan visi pembangunan Kota Palopo tahun 2008 – 2013, maka dirumuskan misi sebagai pernyataan tindakan strategis yang akan dijalankan sebagai berikut :

1. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia.
2. Mewujudkan profesionalisme aparatur, kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat.
3. Mengembangkan produktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha
4. Meningkatkan hubungan kerjasama daerah.
5. Mendorong peningkatan kesadaran hukum dan HAM serta menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan kepariwisataan dan pelestarian budaya daerah.
7. Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Tujuan umum yang hendak dicapai dari visi dan misi di atas adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil serta berkembangnya suasana kehidupan masyarakat yang religius, demokratis dan harmonis

Tujuan strategik dari masing-masing misi di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan strategik misi 1 adalah :

1. Berkembangnya sumber daya manusia yang cerdas, memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, bermoral serta memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama yang dianutnya
2. Berkembangnya keterampilan tenaga produktif, perlindungan sosial dan meningkatnya keluarga sejahtera mandiri
3. Berkembangnya sumber daya manusia yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat dan mampu mengembangkan potensi dirinya menjadi prestasi

Tujuan strategik misi 2 adalah

1. Terselenggaranya pelayanan pemerintahan dengan prinsip good governance sesuai standar pelayanan minimal

Tujuan strategik misi 3 adalah :

1. Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah pada sektor unggulan berbasis pertanian
2. Meningkatnya perekonomian masyarakat pada sektor jasa, perdagangan dan industri berskala kecil dan menengah
3. Berkembangnya pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan
4. Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana untuk menunjang optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi masyarakat

Tujuan strategik misi 4 adalah :

1. Terwujudnya efisiensi penanganan masalah strategis dan prioritas daerah melalui kerjasama daerah
2. Meningkatnya peran investasi pihak swasta dalam pengelolaan potensi sumber daya alam daerah

Tujuan strategik misi 5 adalah :

1. Menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang damai dan kondusif

Tujuan strategik misi 6 adalah :

1. Mewujudkan citra seni budaya dan pariwisata Kota Palopo

Tujuan strategik misi 7 adalah :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan ruang yang lebih baik
2. Terwujudnya lingkungan hidup yang bersih dan hijau, serta Sehat dan lestari

C. Strategi Pembangunan

Strategi pembangunan merupakan suatu cara pandang bagaimana melihat manusia sebagai subjek dan objek pembangunan dalam keseimbangan yang harmonis dengan lingkungan fisik, sosial dan budaya dan ekonomi. Paradigma pembangunan Kota Palopo adalah pembangunan manusia seutuhnya yakni pembangunan manusia yang menyeimbangkan antara karakter manusia yang religius, berbudaya dan beradab, dan upaya menjadikan manusia yang mampu memanfaatkan segenap potensi sumber daya yang ada di lingkungannya antara lain, peluang dagang, industri, pariwisata dan sebagainya. Strategi tersebut ditetapkan sebagai strategi dasar pembangunan yang ditetapkan dengan singkatan Tujuh Dimensi Pembangunan, hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

• **Dimensi Religi**

Terciptanya suasana damai, aman, tertib dan hubungan harmonis bagi pemeluk agama yang diakui oleh NKRI untuk dapat melaksanakan dan mengembangkan syariat agama masing-masing serta interaksi sosial kemasyarakatan yang dilandasi oleh etika moral keagamaan. Masyarakat Kota Palopo pada dasarnya adalah masyarakat dengan karakter religi yang kuat dan mengakar ke dalam segenap sendi-sendi kehidupan berbudaya dan bermasyarakat. Karakter religi diharapkan memberikan warna pada semua aspek pembangunan daerah di Kota Palopo, Hal inilah sehingga aspek religi menjadi kekuatan pertama dan utama dalam pembangunan daerah

- **Dimensi Pendidikan**

Peningkatan dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang handal, profesional, inovatif, kreatif, terampil dan mandiri dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui kelembagaan pendidikan formal dan nonformal untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual serta menjadi manusia yang mampu memanfaatkan potensi yang ada pada diri dan lingkungannya untuk menunjang kesejahteraan diri, keluarga dan lingkungannya.

- **Dimensi kesehatan/olahraga**

Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kualitas jasmani, yakni jasmani yang memiliki ketahanan kesehatan dan jasmani yang memiliki ketahanan fisik. Pembentukan kualitas derajat kesehatan masyarakat dapat dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar kesehatan yang terprogram, mandiri dan berkesinambungan serta pembinaan keolahragaan baik yang berguna bagi kesehatan masyarakat dan pembentukan jasmani yang sehat.

- **Dimensi Adat / Budaya**

Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh pemahaman atas nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Manusia yang berkualitas adalah manusia yang beradat, memiliki kepekaan akan keindahan, serta kebanggaan akan jati diri sebagai manusia yang dibesarkan dalam lingkungan yang beradat dan berbudaya, oleh karena itu upaya pelestarian nilai-nilai budaya daerah dan penguatan kelembagaan adat dan budaya untuk peningkatan ketahanan sosial terhadap pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan tatanan sosial kemasyarakatan.

- **Dimensi Dagang**

Terciptanya iklim usaha yang kondusif yang mendorong berkembangnya aktifitas perdagangan terutama perdagangan berbasis hasil pertanian dan investasi pihak swasta pada sektor pertanian dengan dukungan daerah sekitar (hinterland) dan ketersediaan sarana dan prasarana perekonomian yang memadai. Pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM) terhadap akses permodalan, kemitrausahaan dan informasi peluang pasar

• **Dimensi Industri**

menciptakan tataruang kawasan industri dan pengembangan sentra industri yang berskala menengah, kecil dan home industri yang berorientasi pada kebutuhan pasar dan penyerapan tenaga kerja. meningkatkan daya saing daerah melalui kemudahan berinvestasi, dukungan infrastruktur, kepastian hukum dan jaminan keamanan.

• **Dimensi Pariwisata**

Menciptakan pelayanan kepariwisataan dengan mengedepankan pengembangan potensi obyek dan potensi daya tarik wisata untuk menarik minat pelaku usaha sektor pariwisata. Salah satu potensi wilayah Kota Palopo dalam hal pengembangan pariwisata adalah dengan memperkuat posisi Palopo sebagai pintu masuk tujuan wisata toraja melalui promosi “Palopo the Heart of Sulawesi”

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan strategik di atas, maka asumsi-asumsi dasar diharapkan dapat dipenuhi sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan sebagai berikut :

1. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan handal dalam rangka menghadapi globalisasi. Keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintahan Kota Palopo sangat dipengaruhi oleh adanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam era globalisasi yang semakin kompetitif. Kualitas sumber daya manusia perlu diarahkan pada peningkatan penguasaan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Adanya keseimbangan pembangunan antar daerah, yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Faktor penentu keberhasilan ini sangat dipengaruhi dari rasionalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas yang berwawasan lingkungan dan tekanan penduduk yang terus meningkat. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan pembangunan antar wilayah, Pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi antar wilayah, mengingat kondisi objektif Kota Palopo masih menunjukkan adanya ketimpangan sumber daya ekonomi antar daerah, antar sektor dan golongan masyarakat.
3. Mantapnya pelaksanaan otonomi daerah didukung oleh kerja sama daerah yang saling menguntungkan. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 yang

penekanannya pada otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab di kabupaten dan kota, sangat diperlukan adanya kerjasama inter dan antar daerah, regional dan internasional yang saling menguntungkan guna memantapkan kemandirian daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang tata cara pelaksanaan kerjasama daerah, pada dasarnya desentralisasi terdiri atas desentralisasi hirarkis pemerintahan dan desentralisasi pengambilan keputusan dari Negara/Pemerintah kepada pihak ketiga / publik. Pada desentralisasi hirarkhis pemerintahan yang paling nyata adalah penyerahan kewenangan-kewenangan berupa urusan wajib dan urusan pilihan kepada daerah untuk dilaksanakan sebagai urusan rumah tangga daerah, tentu saja ini merupakan sebuah peluang besar disamping merupakan sebuah ancaman apabila pemerintah daerah dianggap tidak mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik yang pada gilirannya membawa indikasi kepada masalah ketidakpuasan. Bentuk Desentralisasi yang kedua adalah desentralisasi dalam pengambilan keputusan dari pemerintah kepada publik, yaitu berupa pemberian peran kepada publik (masyarakat, swasta, dan pasar) untuk mengambil bagian penting dalam pengambilan kebijakan publik maupun dalam penyelenggaraan kewenangan daerah.

4. Mantapnya kesadaran dan penegakan hukum untuk mencapai stabilitas politik dan keamanan guna mendukung Palopo sebagai daerah tujuan baik untuk kegiatan ekonomi dan bisnis maupun kepentingan wisata. Faktor ini adalah sebagai penentu keberhasilan guna menjamin keamanan dan ketentraman serta ketertiban di dalam kehidupan masyarakat
5. Mantapnya penguatan kelembagaan adat dan budaya didukung oleh kekokohan identitas budaya, keseimbangan sistemik dan kemampuan menangkal pengaruh yang buruk secara dinamik serta ketahanan sosial masyarakat. Faktor penentu keberhasilan ini secara konseptual, ketahanan budaya Palopo merupakan kondisi sistemik dan kondisi dinamik. Bertumpu pada konsep kebudayaan yang luas mencakup ide, dimensi perilaku dan dimensi fisik maka kebudayaan Palopo didasarkan kepada : (1) Ketahanan sistem nilai yang pada hakekatnya sebagai ketahanan dari kebudayaan yang menjadi benteng budaya paling dalam seperti nilai religius, nilai estetika, nilai solidaritas, nilai harmonis dan nilai keseimbangan; (2)

Sistem Prilaku dan kelembagaan atau ketahanan struktural masyarakat adat untuk menghadapi ancaman dari luar. (3) Sistem fisik yaitu keseluruhan symbol dan benda-benda budaya; (4) Sikap budaya atau ketahanan mental yang merupakan ketahanan dari apresiasi para pendukung kebudayaan Palopo dan kebudayaan tana luwu secara keseluruhan; (5) Fungsional yaitu ketahanan system religi, bahasa, kesenian, organisasi sosial, sistem peralatan dan mata pencaharian serta sistem ilmu pengetahuan dan teknologi; (6) Sistemik merupakan refleksi dari kekokohan integritas atau unsur-unsur kebudayaan dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman; (7) Ketahanan dinamik, baik yang disebabkan oleh faktor eksternal, maupun internal sebagai refleksi dari kemampuan untuk menolak dan menerima unsur-unsur budaya asing.

6. Adanya sumber-sumber pendapatan daerah yang mapan dan berkembangnya ekonomi kerakyatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Faktor kunci keberhasilan ini didukung oleh sumber-sumber pendapatan daerah yang mapan dalam melaksanakan pembangunan. Sumber-sumber pendapatan ini baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah maupun pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi perlu ditingkatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, untuk kelanjutan pembangunan terutama pembangunan ekonomi kerakyatan.
7. Adanya aparatur pemerintah yang berkualitas dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Faktor penentu keberhasilan ini adalah berkaitan dengan pengembangan sistem administrasi pemerintahan dan pembangunan yang sesuai prinsip-prinsip *good governance* meliputi : (1) **partisipasi**, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung; (2) **penegakan hukum** mewujudkan penegakan hukum bagi semua pihak, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; (3) **transparansi**, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai; (4) **kesetaraan**, memberi

peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan; (5) **daya tanggap**, meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat; (6) **wawasan ke depan**, membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya; (7) **akuntabilitas**, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas; (8) **pengawasan**, meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibataj swasta dan masyarakat luas; (9) **efisiensi dan efektifitas**, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab; (10) **profesionalisme**, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.

D. Agenda Pembangunan Daerah Tahun 2008-2013

Berdasarkan analisis atas permasalahan sedang dihadapi, substansi dari visi dan misi yang telah ditetapkan, serta tingkat prioritas permasalahan dan kebutuhan daerah, maka agenda pokok pembangunan Kota Palopo ke depan dan kebijakan umum pelaksanaannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Agenda Pertama, Mengembangkan kualitas sumber daya manusia

Pengembangan kualitas sumber daya manusia terkait dengan secara langsung dengan kualitas dan wawasan religi spritual, pendidikan, keterampilan, olah raga dan kesehatan. kualitas manusia mempunyai nilai strategis dalam pembangunan, karena terkait dengan personil yang akan melaksanakan program-program pembangunan. Pembangunan manusia dipandang sebagai pembangunan manusia seutuhnya sehingga komponen-komponen keagamaan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, pemuda dan semua komponen sumber daya manusia

digodok secara konseptual dengan proporsi anggaran yang berimbang, sehingga diharapkan menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spritual, kecakapan hidup yang akan sangat berguna terhadap kesejahteraan diri, keluarga dan lingkungannya. Disamping itu SDM yang handal merupakan potensi yang perlu dipersiapkan dalam rangka menyongsong Kota Palopo sebagai Kota Pelayanan Jasa. Arah kebijakan pengembangan kualitas sumber daya manusia antara lain :

- 1) Mendorong terlaksananya pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau dan bermutu pada seluruh lapisan masyarakat dan memantapkan pelaksanaan program pendidikan gratis terbatas dalam rangka gerakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun
- 2) Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan yang disinergikan dengan ketenagakerjaan, sehingga orientasi dari output pendidikan dan pelatihan tidak hanya *quantity oriented* akan tetapi juga *quality oriented*
- 3) Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan perpustakaan daerah
- 4) Meningkatkan kualitas dan intensitas pembinaan terhadap lembaga keagamaan
- 5) Peningkatan kualitas ummat beragama masyarakat yang disinergikan dengan pendidikan pada semua level, dimana nilai-nilai dan kesadaran untuk menjalankan syariat agamanya dapat lebih ditingkatkan melalui pendidikan formal dan non formal
- 6) Peningkatan kualitas iman dan taqwa melalui pembinaan dan aktualisasi nilai-nilai agama dengan mengadakan penataan ruang fasilitas keagamaan dan mendorong peningkatan kesejahteraan para imam mesjid, guru mengaji, dan rohaniawan lainnya
- 7) Peningkatan kualitas kerukunan beragama dengan memanfaatkan wacana dialog
- 8) Memfasilitasi pemberian bantuan stimulan berupa pembinaan keterampilan kepada kelompok pemuda produktif

- 9) Memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana keluarga korban bencana dan tidak mampu serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah sosial
- 10) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pembinaan keluarga sejahtera mandiri
- 11) Mengembangkan kepribadian dan jati diri pemuda dan perempuan, sehingga memiliki etos kerja produktif sehingga mampu mejadi pelopor pembangunan di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan untuk kaum perempuan adalah program pengembangan dan kesetaraan gender dalam pembangunan baik promosi jabatan, politik dan sosial kemasyarakatan secara proporsional
- 12) Menciptakan kader-kader anti patologi sosial yang dimotori oleh perempuan, generasi muda dan mendorong partisipasi masyarakat
- 13) Memantapkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan mengaktualisasikan TRIDAYA menuju kemandirian lokal dengan berdasarkan kearifan lokal dan potensi yang ada
- 14) Mendorong peran perempuan dalam pembangunan daerah
- 15) Memantapkan pelaksanaan program pelayanan kesehatan gratis dan bermutu kepada seluruh lapisan masyarakat
- 16) Mengembangkan program Kota Sehat mengutamakan upaya preventif dan kuratif dengan tidak mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Sasarannya adalah penciptaan penciptaan lingkungan sehat dan perilaku sehat dalam masyarakat
- 17) Mendorong peningkatan SDM tenaga kesehatan guna pemberian pelayanan prima dan maksimal kepada masyarakat;
- 18) Untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, akan diupayakan optimalisasi bantuan kepada PUSKESMAS dan PUSTU di tingkat bawah dan upaya pengadaan *Medical Mobile*;
- 19) Mempertahankan dan menjamin ketahanan kesehatan masyarakat, melalui pelayanan kesehatan dasar (gisi, imunisasi, kesehatan ibu dan anak dan

lain-lain), sehingga dapat mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan;

- 20) Menyediakan format program pembinaan prestasi pemuda dan olah raga serta meningkatkan peran swasta dalam pembinaan olah raga
- 21) Menjadikan Kota Palopo sebagai pusat pembinaan atlet-atlit berprestasi dan sentra pembinaan cabang olah raga berprestasi

2. Agenda Kedua, meningkatkan produktifitas ekonomi masyarakat :

Dengan memperhatikan posisi geografis dan potensi sumber daya yang dimiliki serta daya dukung wilayah hinterland dan daya dukung wilayah seperti Teluk Bone yang memiliki potensi kelautan, sehingga pelayanan jasa yang dijadikan sebagai tumpuan dalam rangka membangun perekonomian Kota Palopo terutama jasa yang berbasis pertanian. Visi kota pelayanan jasa mengedepankan pembangunan ekonomi dan mendayagunakan sumber daya kelautan (*Ocean based resource*) dan sumber daya daratan (*land basecd resources*) serta memanfaatkan risoursis pendukung lainnya yang diharapkan mampu berkompetisi di pasar regional dan nasional.

Dalam era otonomi daerah, paradigma ekonomi perlu direposisi dimana masyarakat tidak lagi dijadikan obyek pungutan, akan tetapi peningkatan penerimaan dapat dilakukan dengan melakukan **ekstensifikasi dan intensifikasi melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah**, dengan memberikan keleluasaan berusaha kepada masyarakat dan menciptakan inovasi-inovasi usaha serta memaksimalkan semua potensi yang ada, sehingga pembangunan ekonomi yang mengarah pada out put semata harus ditinggalkan dan mengembangkan pada pembangunan yang memberikan nilai tambah (*value added*), kesejahteraan rakyat dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Untuk mengantisipasi pesatnya perkembangan teknologi, maka konsep pemikiran jangka panjang diarahkan pada pengembangan tekno ekonomi, dimana implikasi kebijakan adalah pentingnya strategi pembangunan industri yang berorientasi ke dalam (*insourcing*) melalui teknologi untuk *core competence* (kompetensi inti) guna mengurangi kelemahan

pembangunan yang berorientasi keluar (*out sourcing*) melalui impor modal dan teknologi, sehingga kebijakan-kebijakan berupa fasilitas insentif yang menguntungkan bagi pengembangan investasi sektor swasta perlu dilahirkan.

Kebijakan-kebijakan dalam rangka melaksanakan agenda peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat antara lain :

- 1) Menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan memantapkan ketahanan pangan daerah, serta mendukung program gerakan surplus beras Sulawesi Selatan
- 2) Mendorong dan memfasilitasi pemakaian benih bersertifikat dan meningkatkan kualitas SDM petani
- 3) Mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya perlindungan hutan
- 4) Memfasilitasi pengembangan pengelolaan hasil usaha perikanan melalui pengembangan SDM nelayan, pemanfaatan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
- 5) Mengembangkan sumber daya kelautan (pelabuhan) sebagai basis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat
- 6) Penyediaan fasilitas ekonomi yang menunjang pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pola kemitraan dengan pihak investor dan pemilik modal.
- 7) Meningkatkan daya saing hasil tambak dan rumput laut yang berbasis teknologi.
- 8) Mewujudkan pembangunan Kawasan Industri Palopo (KIPA) guna mengantisipasi perkembangan lahirnya industri-industri baru yang mengakomodir kebutuhan daerah di wilayah Sulawesi bagian Utara dan Tenggara.
- 9) Pengadaan sarana dan prasarana jaringan transportasi darat dan laut
- 10) Mengantisipasi kemungkinan interkoneksi aktivitas ekonomi antara wilayah yang bertujuan secara sinergik memperkuat ketahanan ekonomi

antar wilayah. Untuk itu perlu dibangun secara terpadu kerjasama ekonomi dengan daerah-daerah yang ada di sekitar Kota Palopo.

- 11) Mengembangkan wawasan dan perubahan perilaku untuk memberi nilai tambah terhadap hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah (value added)
- 12) Meningkatkan pembinaan dan mengembangkan usaha dagang dan industri berskala kecil dan menengah bertumpu pada potensi lokal
- 13) Menyediakan fasilitas pengembangan usaha industri kecil dan menengah berbasis rumah tangga
- 14) Memfasilitasi kerjasama kemitraan UMKM dengan lembaga keuangan
- 15) Memfasilitasi pengelolaan potensi sumber daya alam berwawasan lingkungan dengan pola pemberdayaan
- 16) Khusus energi listrik akan dibuka peluang investasi kepada PLN dan pihak swasta baik lokal maupun dari luar, untuk membangun pembangkit-pembangkit listrik berbasis potensi SDA seperti PLTA, Micro Hydro dan Tenaga surya
- 17) Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana daerah, sarana dan prasarana air bersih dan air minum, dengan memperhatikan aspek pemerataan antar wilayah, prioritas kebutuhan dan pemberdayaan masyarakat setempat

3. Agenda ketiga, Mewujudkan profesionalisme aparatur dan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat

Paradigma pemerintahan dalam era otonomi harus sejalan dengan keinginan reformasi yaitu dimana peran pemerintah berubah dari “**mengayuh**” menjadi “**mengarahkan**” dan “**memfasilitasi**”, sesuai dengan tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Fungsi utama pemerintahan, adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintah bertanggung jawab menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan berkreasi demi mencapai kemajuan bersama. Secara umum,

tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup bidang pelayanan, pemeliharaan sumberdaya alam dan lingkungan. Secara prinsipil kewenangan yang diberikan kepada suatu organisasi pemerintahan dimaksudkan untuk memaksimalkan fungsi-fungsi utama pemerintahan yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*) dimana pada akhirnya diharapkan adanya kemampuan dari segenap masyarakat mengembangkan kreativitasnya untuk mampu mengatasi masalahnya sendiri demi kemajuan bersama. Dalam melaksanakan agenda mewujudkan profesionalisme aparatur, dan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat, maka arah kebijakan yang ditempuh ke depan antara lain:

- 1) Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintah daerah
- 2) Mengadakan penataan kelembagaan secara proporsional dan fungsional. Penataan struktur organisasi terkait dengan sistem birokrasi dan penyempurnaan struktur sesuai kebutuhan dan tuntutan sebagai kota pelayanan jasa;
- 3) Mendorong peningkatan kemampuan kerja dan peningkatan kinerja aparat melalui pendidikan penjenjangan dan pelatihan teknis serta peningkatan strata pendidikan;
- 4) Mengembangkan sikap perilaku dan kepribadian aparatur sebagai aparatur pelayan jasa, yang mampu memberikan informasi kepada publik secara profesional
- 5) Penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan publik yang menjadi tugas dan wewenang instansi yang memiliki unit pelayanan publik
- 6) Mengembangkan sistem informasi pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal
- 7) Mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan umum dengan prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabilitas
- 8) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah

- 9) Pelibatan tokoh masyarakat, agama dan lembaga adat dalam hal perumusan kebijaksanaan yang bersifat khusus;
- 10) Penguatan kelembagaan ekonomi, sosial politik dan IPTEK melalui program kemitraan dengan kelompok/lembaga yang ada dan datang di Kota Palopo dimana pemerintah sebagai media katalisator dan fasilitator;
- 11) Peningkatan kualitas organisasi lembaga kemasyarakatan yang ada melalui inventarisasi, klasifikasi dan identifikasi sehingga institusi dapat berjalan sesuai norma dan koridor yang ada;
- 12) Mendorong lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada, dalam hal alih dan transfer teknologi melalui pelatihan dan pendidikan teknis serta pengembangan IPTEK
- 13) Mengarahkan kelembagaan masyarakat pada terbentuknya *corporate culture image*, sehingga masyarakat mampu memprediksikan arah dan tujuan organisasi;
- 14) Membuka ruang pusat informasi dan komunikasi publik pembangunan daerah
- 15) Meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik
- 16) Menata PERDA yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, dan mengeliminir yang tidak efektif terhadap pembangunan

4. Agenda Keempat, meningkatkan hubungan kerjasama daerah,

Reformasi desentralisasi nasional merupakan perwujudan dari komitmen Indonesia menuju pemerintahan daerah yang lebih demokratis dan berkesinambungan. Melalui Undang-undang Pemerintahan Daerah telah membuka kesempatan yang luas bagi usaha pembangunan daerah dan bagi partisipasi warga masyarakat yang lebih besar dalam pemerintahan. Dengan asas desentralisasi kewenangan Pemerintah diserahkan kepada daerah otonom dan daerah otonom diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan inilah daerah diberikan

kewenangan untuk melakukan kerjasama antara daerah dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga lainnya. Dengan kerjasama daerah akan merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan keterikatan antara satu daerah dengan daerah lainnya serta menyerasikan pembangunan daerah, dapat mensinergikan potensi antara daerah atau pihak ketiga. Melalui kerjasama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam pelayanan umum khususnya di daerah-daerah perbatasan antara daerah dan daerah tertinggal, begitupula dengan kerjasama dengan pihak ketiga, dapat dilakukan transper ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun arah kebijakan program dalam pelaksanaan agenda ke empat ini adalah :

- 1) Memfasilitasi terselenggaranya kerjasama daerah dengan pihak ketiga dan kerjasama antara daerah dalam penanganan masalah strategis lintas daerah dan masalah strategis lainnya
- 2) Memberikan fasilitas untuk mendorong pengembangan investasi pihak ketiga

5. Agenda Kelima, mendorong peningkatan kesadaran hukum dan HAM serta pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Agenda ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum bagi masyarakat maupun aparat penyelenggara negara secara keseluruhan dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peran dan fungsi aparat penegak hukum yang diharapkan akan dapat menciptakan budaya hukum yang baik pada semua lapisan masyarakat. Melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dalam agenda ini sehingga diharapkan semakin meningkatnya jumlah masyarakat dan aparat penyelenggara negara yang sadar terhadap hak dan kewajibannya, serta semakin meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan pembangunan. Adapun kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam agenda ini antara lain:

- 1) Melakukan sosialisasi kesadaran hukum dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan lingkungan

- 2) Mendorong terselenggaranya kegiatan peningkatan wawasan mengenai HAM
- 3) Menggunakan nilai-nilai budaya luhur dan kearifan lokal dengan mendorong peran lembaga-lembaga adat sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
- 4) Melakukan pendekatan penyadaran hukum yang lebih demokratis melalui pendekatan dialogis antara instansi/lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan yang memfasilitasi penyadaran hukum dengan masyarakat untuk mengembangkan kesadaran dan peranserta mereka terhadap hukum dan sistem penegakannya.
- 5) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengaktualisasikan hak serta melaksanakan kewajiban masyarakat sebagai warga negara sekaligus dalam rangka membentuk budaya hukum bagi masyarakat dan aparat pemerintah.
- 6) Meningkatkan penggunaan media komunikasi yang lebih moderern dalam rangka pencapaian sasaran penyadaran hukum di berbagai lapisan masyarakat.

6. Agenda Keenam, meningkatkan pelayanan kepariwisataan dan pelestarian budaya daerah.

Budaya merupakan hasil dari keseluruhan cipta, rasa dan karsa manusia sepanjang hidupnya yang merupakan salah satu kekayaan. Kota Palopo secara historis adalah merupakan pusat kebudayaan di Tana Luwu dan Sulawesi Selatan sehingga pengembangan dan pemeliharaan budaya menjadi sebuah masalah penting. Kondisi menjadi ironi mengingat Kota Palopo sebagai bekas pusat kerajaan besar memiliki situs-situs sejarah dan budaya yang memiliki daya tarik tersendiri bagi hadirnya para investor untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi di Kota Palopo. Adapun kebijakan-kebijakan dalam agenda ini antara lain:

- 1) Melakukan pembinaan dan pengelolaan potensi objek wisata

- 2) Melakukan upaya pembinaan dan pelestarian aset budaya daerah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya daerah
- 3) Merevitalisasi kawasan bersejarah yang ada dalam Kota Palopo, sehingga mampu menunjukkan jati diri sebagai kawasan budaya.
- 4) Mereposisi peran Museum, dimana museum bukan hanya sebagai tempat menyimpan benda-benda cagar budaya, akan tetapi memiliki fungsi lebih luas sebagai pusat informasi budaya, pusat riset dan pusat pengembangan budaya.
- 5) Mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki wawasan budaya dan pengetahuan kepariwisataan yang memadai sebagai bentuk kesiapan pelayanan.
- 6) Menciptakan wawasan baru kepada masyarakat tentang budaya dan kepariwisataan, melalui kegiatan sosialisasi.
- 7) Membentuk sentra-sentra budaya dan seni yang dapat menjadi tujuan wisata Kota Palopo.
- 8) Mendorong partisipasi masyarakat dan kerjasama daerah dalam mempromosikan wisata dan potensi budaya di Kota Palopo.
- 9) Mengaktifkan kajian-kajian budaya pada tingkat perguruan tinggi melalui penelitian dan pengembangan budaya.

7. Agenda Ketujuh, meningkatkan pengelolaan pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan :

Isu lingkungan menjadi sesuatu persyaratan mutlak bila kita ingin ikut berinteraksi secara global, sebuah produk atau sebuah industri akan sulit berinteraksi dengan dunia luar manakala isu strategis ini dikesampingkan. Untuk itu, kedepan Pemerintah Kota Palopo harus menjadikan hal ini sebagai satu budaya bagi seluruh masyarakat untuk secara kontinyu memperhatikan lingkungan. Resultante dari perbaikan lingkungan adalah potensi untuk mengembangkan budaya lokal dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan. Kebijakan-kebijakan dalam agenda ini antara lain

- 1) Mengembangkan pengelolaan lingkungan hidup yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan mendukung kota sehat
- 2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup
- 3) Menciptakan Master Plan dan tata ruang wilayah dengan berorientasi pada pembangunan yang ramah lingkungan.
- 4) Pengendalian dan pengembangan penataan ruang secara terpadu
- 5) Pengembangan sarana dan prasarana permukiman yang mengacu pada tata ruang yang terpadu
- 6) Mengembangkan sumber daya alam utamanya daerah pesisir dan hulu yang mengacu pada tatanan lestari lingkungan, serta rehabilitasi lingkungan yang kritis.
- 7) Mengembangkan wilayah hutan yang diarahkan pada pengembangan wisata agro dan riset.
- 8) Menata kembali aspek legal mengenai pemanfaatan lingkungan, hutan, dan lahan kritis.
- 9) Memantapkan pengelolaan kebersihan lingkungan dengan melibatkan komponen masyarakat sebagai pelaku utama (privatisasi).
- 10) Memantapkan pengelolaan lingkungan pada lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah dari open dumping menjadi semi sanitary yang mengarah pada sanitary landfill.